

IMPLEMENTASI KADERISASI DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JAWA TIMUR

Hasan Ismail, Indah Murti

hasanismail@gmail.com, indahmurti88@yahoo.co.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

In a democratic political system, the political parties, The political party is the main actor in the democratic system with a win in the legislative and executive power. Political parties play a role to mint quality leader, with a qualified leader then it will affect the elektabilitas political party. In an attempt to mint a quality leader candidates then must be exercised political Caderization. According to George C Edward III in Subarsono (2015; 90) provides the view that policy implementation is influenced by four variables: communications, bureaucratic structure, resources, disposition (attitude). As for the objective of reconstruction the DPD PDI-P East Java Caderization and the factors that influence the implementation of Caderization. Thesis authors in using qualitative descriptive method for describing the nature of something that was on going at the time of the studies. Based on the results of the reconstruction of DPD PDI-P East Java implemented cooperatively and carried out by BADIKLAT-DA and Caderization Committee. The process in the preparazed of the event activities is implemented by carrying out coordination with DPD PDI-P East Java Trustees. The implementation of Caderization DPD PDI-P East Java influenced communication, structures, resources and disposition. In terms of communication is affected, the submission of clear information, consistency of commands as well as the effectiveness of socializing with a formal letter. In terms of structure influencing the formation of the BADIKLAT-DA, and officials of the Caderization, the establishment of a good coordination between the implementation of DPD with them, the technical guide and curriculum implementation of Caderization. In terms of resources, support and spread information implementation of Caderization. In terms of the disposition of affected presbyter of the executive from the executive branch of the DPD PDI-P East Java. The authors give a suggestion for DPD PDI-P East Java recommended still carry out collaboration in the implemented of caderization, and keep pay attention to factors communication, structures, resources and implementing disposition of carrying out Caderization.

Keywords: Implementation, Political Parties and Caderizatton

ABSTRAK

Dalam sistem politik demokratis, partai politik menjadi wujud ekspresi ide-ide pemikiran dalam masyarakat politik, untuk memberi pengaruh yang kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Partai politik merupakan aktor utama dalam sistem demokratis dengan memenangkan dalam perebutan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Partai politik berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas, dengan pemimpin yang berkualitas maka akan mempengaruhi elektabilitas partai politik. Dalam upaya menciptakan calon pemimpin yang berkualitas maka harus dilaksanakan kaderisasi politik. menurut George C Edward III dalam Subarsono (2015;90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : komunikasi, stuktur birokrasi, sumberdaya, disposisi (sikap). Adapun secara umum tujuan peneliti ingin mengetahui implementasi kaderisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur. penulis dalam pembuatan skripsi menggunakan metode diskriptif kualitatif untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur dilaksanakan secara gotong-royong dan dilaksanakan oleh BADIKLAT-DA dan Kepanitiaan Kaderisasi. Proses penyusunan acara kegiatan dilaksanakan dengan melakukan kordinasi dengan pengurus DPD PDIP Jawa Timur. Implementasi kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur dipengaruhi komunikasi, struktur, sumberdaya dan disposisi. Dalam hal komunikasi dipengaruhi, penyampaian informasi yang jelas, konsistensi perintah serta efektifitas sosialisasi dengan surat formal. Dalam hal struktur dipengaruhi, adanya BADIKLAT-DA dan Kepanitian kaderisasi, terjalinya kordinasi yang baik antara DPD dengan pelaksana kaderisasi, serta adanya pembegian tugas, petunjuk teknis dan kurikulum pelaksanaan kaderisasi. Dalam hal sumberdaya dipengaruhi keterlibatan sumberdaya manusia dan fasilitas yang memadai serta didukung sumber dana yang cukup dan penyebaran informasi pelaksanaan kaderisasi. Dalam hal disposisi dipengaruhi prespsi pelaksana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kaderisasi, dan respon dari pelaksana untuk melaksanakan kebijakan kaderisasi serta tindakan yang dilakukan oleh pelaksana dengan langkah-langkah kongrit sesuai petunjuk teknis dan arahan DPD PDIP Jawa Timur. Penulis memberikan saran untuk DPD PDIP Jawa Timur disarankan tetap melaksanakan budaya gotong-royong dalam pelaksanaan kaderisasi, dan tetap memperhatikan faktor komunikasi, struktur, sumberdaya dan disposisi pelaksana dalam melaksanakan kaderisasi

Kata Kunci: Implementasi, Partai Politik dan Kaderisasi

Pendahuluan

Partai politik memiliki peran dan fungsi yang dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan fungsi internal organisasi. Hal ini partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang partai politik. Kedua, partai politik mengemban peran dan fungsi eksternal organisasi. Hal ini, peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Kaderisasi merupakan urat nadi bagi pengembangan kapabilitas kader partai politik. Kaderisasi sebagai proses penyiapan sumberdaya manusia, agar kelak mampu membangun peran dan fungsi organisasi menjadi lebih baik. Kaderisasi bertujuan untuk peningkatan kemampuan baik ketrampilan maupun pengetahuan serta menyediakan stok kader dalam partai politik. Dalam pengkaderan, ada dua persoalan yang penting. Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh parpol untuk meningkatkan kemampuan baik ketrampilan maupun pengetahuan. Kedua, kemampuan untuk menyediakan stok kader, dikhususkan pada kaum muda. Hal ini merupakan bentuk pendidikan politik, dimana selama ini peran tersebut terabaikan. sehingga sekarang ini yang terjadi adalah proses seleksi yang serampangan yang dilakukan oleh partai politik, sehingga banyak partai politik melahirkan kader instan, yang akan dijadikan calon wakil rakyat, selain itu melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, mencuatnya kasus-kasus hukum, khususnya pada kasus korupsi yang melibatkan beberapa kader partai politik di Legislatif dan Eksekutif. Keterlibatan para kader partai politik dalam beberapa kasus hukum, mencerminkan betapa rendahnya kapabilitas serta moral kader partai politik, rendahnya kapabilitas kader partai politik berdampak buruk bagi masyarakat, parlemen dan pemerintahan, serta partai politik itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan betapa lemahnya kaderisasi partai politik akhir-akhir ini.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan salah satu partai besar di indonesia, sebagai partai pemenang pemilihan umum tahun 2014, dengan ini membuktikan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki massa yang cukup banyak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki kader dan simpatisan yang sangat besar diseluruh Indonesia, maka dari itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat disoroti dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan fungsi sebagai partai politik, terlebih pada fungsi kaderisasi politik. Dengan terlaksananya kaderisasi secara optimal maka akan menciptakan kader-kader terbaik untuk dicalonkan dalam perebutan kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Sehingga para kader yang mendapatkan mandat di Legislatif dan Eksekutif mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berideologi Pancasila, senantiasa memperjuangkan cita-cita proklamasi 1945, dengan jalan trisakti sebagai arah dan nafas perjuangannya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menasbihkan dirinya sebagai partai rakyat kecil atau dengan slogan “partai ne wong cilik”, agar memiliki kader yang berwatak dan berdedikasi sesuai watak partai perlu dilakukannya sebuah kaderisasi politik untuk mencapainya. Kaderisasi merupakan kebutuhan bagi partai politik, guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas kader, selain itu juga sebagai proses regenerasi dalam menjalankan keberlanjutan perjuangan. Namun hal yang perlu diperhatikan, yakni bagaimana implementasi kaderisasi yang komprehensif dan mapan guna memunculkan kader yang memiliki kualitas, kapabilitas dan konsistensi dalam menjalankan ideologi perjuangan.

Metode

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik. Peneliti berperan untuk mengali informasi, data dan fenomena dalam pelaksanaan kaderisasi. keberhasilan penelitian ini sangat tergantung pada peran peneliti.

Dengan melakukan wawancara peneliti ingin mendapatkan informasi sedetail-detailnya dari sumber pertama dilapangan. maka peneliti terjun langsung ke lapangan. Peneliti yang terjun ke lapangan akan mampu menjadi bagian dari subyek dan obyek penelitian sehingga akan diketahui keadaan yang sebenarnya (realitas yang ada). Sehingga permasalahan yang diteliti benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak menyimpang serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterlibatan langsung peneliti di lapangan dilakukan demi tercapainya proses penelitian yang lebih baik. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen dan sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pelapor penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian di DPD PDIP Jawa Timur, Jl. Raya Kendangsari Industri No.57, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292, dengan menggunakan informan dari kader-kader dan fungsionaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur, sehingga informasi tersebut mampu merepresentasikan implementasi kaderisasi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur. Burhan Bungin (2011:48) dikutip Listiani Oktaria (2016:32) menyatakan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yakni: data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Telah dibahas dalam bab metode penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan judul Implementasi Kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur. Pada sub bab ini penulis akan membahas implementasi kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur dan hubungan implementasi kaderisasi dengan faktor komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan sikap pelaksana. Pertama pembahasan implementasi kebijakan kaderisasi di DPD PDIP JATIM. Kedua akan membahas hubungan implementasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu seperti yang dikatakan George C Edward III dalam Subarsono (2015:90) yang memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni :

(1) komunikasi, (2) struktur birokrasi, (3) sumberdaya, (4) disposisi (sikap),. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Bedasarkan hasil wawancara dengan para informan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan kaderisasi tingkat madya oleh, DPD PDIP Jawa Timur pada periode kepengurusan tahun 2015-2020 belum dilaksanakan, adapun pelaksanaan kaderisasi akan dilaksanakan pada bulan juli tahun 2017. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan van Horn (1975) dalam Wahab (2016:135) merumuskan proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individualis (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in priorr policy decison*” tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Melihat fenomena dari hasil wawancara dengan pengurus DPD PDIP Jawa Timur, maka dapat kita ketahui implementasi kebijakan kaderisasi tingkat madya belum dilaksanakan oleh DPD PDIP Jawa Timur periode kepengurusan Tahun 2015-2020, kaderisasi akan diselenggarakan rencananya pada bulan juli tahun 2017, maka dapat disimpulkan implementasi kaderisasi tingkat madya belum terleksana dan masih dalam proses perencanaan. Namun DPD PDIP Jawa Timur telah melaksanakan kaderisasi tingkat madya terakhir pada tahun 2014 di Hottel Utami Sidoarjo. Berdasarkan dokumen buku kerangka acuan pendidikan kader yang diselenggarakan pada 15-16 September 2014, DPD PDIP Jawa Timur telah mengimplementasikan kaderisasi tingkat madya. Pelaksanaan kaderisasi tingkat madya yang dilekasanakan oleh DPD PDIP Jawa Timur, berdasarkan AD-ART Partai, Intruksi DPP PDIP Nomer: 5007/IN/DPP/VIII/2014 Tertanggal 12 Agustus 2014. Adapun upaya yang telah dilakukan DPD PDIP Jawa Timur yakni dengan adanya BADIKLAT-DA dan tersusunya acara kaderisasi pada tahun 2014 meliputi, sumber daya manusia, fasilitas dan materi kaderisasi, adapun pelaksanaan kaderisasi dilakukan kordinasi antara panitia pelaksana yang tergabung dalam BADIKLAT-DA dengan Pengurus DPD PDIP Jawa Timur.

Berdasarkan fenomena yang ada dalam pelaksanaan kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur menggunakan konsep kaderisasi secara formal, yakni menggunakan metode pemberian materi secara umum dan secara khusus, ini dapat kita lihat dari bukti dokumen kerangka acuan pendidikan kader dalam pelaksanaan kaderisasi tingkat madya pada tahun 2014. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra kota Malang. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Triwahyudi pada tahun 2015, menyatakan bahwa konsep kaderisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra kota Malang lebih mengandalkan pendidikan politik secara non formal.

Berdasarkan fenomena yang ada rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDIP khususnya di beberapa daerah di Jawa Timur pada prosesnya masih ada beberapa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP yang bukan dari kader partai, kader partai hanya mengisi jabatan publik yang tidak strategis. Dalam kaitannya dengan Misi Partai yakni mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, kaderisasi PDIP Jawa Timur masih belum maksimal.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satunya faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III dikutip Armei Yudha Purwitasari (2012:31) yang menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan kaderisasi, terdapat beberapa faktor pendorong yaitu:

- a. Penyampaian informasi dari DPP ke DPD PDIP Jawa Timur, serta dari DPD ke panitia pelaksana berjalan lancar, dan jelas.
- b. Terdapat konsistensi dalam penyampaian pesan atau perintah-perintah kebijakan, artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.
- c. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh DPD ke DPC dan anggota DPRD Jawa Timur menggunakan surat.

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai

suatu tujuan tertentu. Menurut Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Daru Wisakti (2008:60) birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran perencanaan belum tentu berhasil apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan jika tidak memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dalam pelaksanaan kaderisasi, terdapat beberapa faktor pendorong yakni:

- a. Adanya intansi BADIKLAT-DA DPD PDIP Jawa Timur
- b. Tebentuknya kepanitian pelaksana kaderisasi dalam melaksanakan kaderisasi.
- c. Terjadinya pembagian tugas kepanitiaan
- d. Adanya petunjuk teknis dan kurikulum pelaksanaan kaderisasi
- e. Terjalinya kordinasi yang baik antara DPD dengan pelaksana kaderisasi

Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten serta kerja sama yang dilakukan oleh struktur organisasi, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Menurut Winarno (2002) dalam Daru Wisakti (2008:45) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Dari hasil penelitian dalam hubungan sumberdaya dalam pelaksanaan kaderisasi, terdapat beberapa faktor pendorong yakni:

- a. Fasilitas yang memadai meliputi, tempat, ruangan dan perlengkapan.
- b. Sumber dana yang cukup
- c. Penyebaran informasi pelaksanaan kaderisasi

d. Keterlibatan panitia pelaksana

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan sangat penting. Hessel (2003:90) dikutip Daru wisakti (2008; 141) menyatakan Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit ”

Pendapat Hassel diatas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak sependapat terhadap kebijakan tersebut, maka akan mengarah untuk tidak dilakukan. Dalam kaitanya dengan implementasi kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan faktor pendorong yakni;

- a. Adanya presepsi pelaksana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kaderisasi.
- b. Adanya respon dari pelaksana untuk melaksanakan kebijakan kaderisasi.
- c. Adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaksana dengan langkah-langkah kongrit sesuai petunjuk teknis dan arahan DPD PDIP Jawa Timur.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam implementasi kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur pada periode kepengurusan 2015-2020 belum terlaksana. rencana pelaksanaan kaderisasi tingkat madya akan dilaksanakan oleh DPD PDIP Jawa Timur pada juli 2017. pelaksanaan kaderisasi tingkat madya, terakhir diselenggarakan oleh DPD PDIP Jawa Timur pada tahun 2014 yang diselenggarakan di Hottel Utami Sidoarjo pada tanggal 15-16 September 2014 yang dilaksanakan oleh BADIKLAT-DA dan kepanitiaan. Proses penyusunan acara kegiatan dilaksanakan dengan melakukan kordinasi

dengan pengurus DPD. Pelaksanaan kegiatan kaderisasi dilaksanakan dengan gotong royong dalam artian terlaksananya kegiatan kaderisasi menjadi tanggung jawab bersama, dengan adanya prosedur pelaksanaan yang meliputi petunjuk teknis dan kurikulum materi kaderisasi dalam dokumen buku kerangka acuan pendidikan kader yang dilaksanakan di Hottel Utami Sidoarjo, sehingga kaderisasi tingkat madya tahun 2014 dapat berjalan lancar.

2. Namun Kaderisasi DPD PDIP Jawa Tmur belum bisa dikatakan berjalan sesuai Misi PDIP yakni mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender, hal ini disebabkan masih adanya beberapa daerah di Jawa Timur PDIP tidak mampu mencalonkan kader internal partai dalam pencalonan kepala Daerah, maka dapat disimpulkan Kaderisasi PDIP belum menciptakan calon-calon pemimpin untuk mengisi jabatan publik yang strategis.
3. Beberapa Faktor yang mempengaruhi implementasi kaderisasi DPD PDIP Jawa Timur yakni komunikasi, struktur, sumberdaya dan disposisi (sikap) dari para pelaksana dalam mengimplementasikan kaderisasi tingkat madya pada tanggal 15-16 September 2014 di Hottel Utami Sidoarjo:
 - a. Faktor pendorong terlaksananya kaderisasi di DPD PDIP Jawa Timur terkait komunikasi antara lain; Penyampaian informasi berjalan lancar dan jelas. Konsistensi perintah-perintah dan tidak bertentangan. Serta efektifitas sosialisasi dengan menggunakan surat formal.
 - b. Faktor yang memperlancar pelaksanaan kaderisasi di DPD PDIP Jawa Timur terkait struktur antara lain; adanya instansi BADIKLAT-DA dan kepanitian pelaksana kaderisasi dalam melaksanakan kaderisasi dan terjalinya kordinasi yang baik antara DPD dengan pelaksana kaderisasi, serta adanya pembagian tugas dan petunjuk teknis serta kurikulum pelaksanaan kaderisasi
 - c. Faktor pendorong terlaksananya kaderisasi di DPD PDIP Jawa Timur terkait sumberdaya antara lain; Keterlibatan sumberdaya manusia dan

fasilitas yang memadai serta didukung sumber dana yang cukup dan penyebaran informasi pelaksanaan kaderisasi.

- d. Faktor pendorong terlaksannya kaderisasi di DPD PDIP Jawa Timur terkait sikap pelaksana antara lain; Presepsi pelaksana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kaderisasi, dan respon dari pelaksana untuk melaksanakan kebijakan kaderisasi, serta tindakan yang dilakukan oleh pelaksana dengan langkah-langkah kongrit sesuai petunjuk teknis dan arahan DPD PDIP Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Afifa, Wakhidatul. (2011) *Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Perjuangan Kabupaten Semarang*. Semarang:Universitas Negeri Semarang
- Armei Yudha Purwitasari (2012) *Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2011*. Jakarta:Universitas Indonesia
- Assidiqie, Jimly. (2006). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Pression
- Budiharjo, Mariam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Firmanzah.(2008). *Marketing Politik - Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurazizah. Usman,Jaelan. Prianto,Andi Luhur. (2015) *Kaderisasi Partai Nasdem Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 Dikabupaten Maros*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Nurdin, Asrul. (2013) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalan di Kota Makassar*. Makassar:Universitas Hasanuddin Makassar
- Oktaria, Listiani. (2016).*Peran Warung Kopi Gathel sebagai Media Komunikasi Interpersonal dalam Menjalin Keakraban antar warga*. Surabaya:Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

- Panantang, Gylang Virgo. (2014) *Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Priyanto, Budi. (2009). *Pelembagaan Politik PDIP JATENG*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Romli, Liliy. (2005). *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: Jurnal Analisi CSIS
- Saputra, Roni Tamara. (2014). *Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009 Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara*. Samarinda: ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Setiawan, Tri Wahyudi Budi. (2015) *Proses Kaderisasi Partai Gerindra di Kota Malang*, Malang: Universitas Brawijaya
- Subarsono, AG.(2015). *Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan ke III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke II. Bandung: Alfabeta
- Susanto, Joko. (2016) *Peran Kaderisasi Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik, Studi Kasus Terhadap DPC Partai Gerindra di Kota Bandung*, Bandung: Universitas Pasundan
- Triwidaryanta, Tri dkk.(2008). *Modul pengkaderan Partai Politik*. . Yogyakarta: Strategic Transformation Institut
- Umar, Husein. (2005). *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Edisi Revisi Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amanden ke 4
- Undang-Undang No.02 Tahun 2011, pengganti Undang-Undang No.02 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Usman, Husain dan Akbar, Purnomo Setiady.(2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul (2016) *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Cetak ke IV. Jakarta: Bumi Aksara